

RELEVANSI FALSAFAH ORANG TENGGER TENTANG KEBAHAGIAAN TERHADAP UPAYA PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

MOHAMMAD BAHRUL ULUM

Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email: sanglaut@gmail.com

Abstract:

Against the understanding that the deep-rooted moral wisdom in Tenggerese life can be an alternative way of view amid the current multidimensional crisis, it aims to construct the theoretical constructs of the concept of happiness in Tengger's view and how relevant it is to the nation's character education efforts. The theoretical constructions are done by using Aristotelian ethical theory (eudaimonisme) as a way of looking at the ethical values in the life of the Tenggerese.

This research is a literature study (library research). Aristotelian ethics is the formal object of research, while its material object is the Tenggerian view of the nature of happiness. The methods used are induction, interpretation, and comparison. The method is used to analyze the meaning of happiness in Tengger's view which is then reviewed from the perspective of the ethics of Aristotle's happiness.

Happiness in the Tenggerian view implies a state of equilibrium in total religiosity, so happiness can be called the ultimate goal of all the realities of this nature. Aristotle sees happiness as a "fullness" whose value can not be restricted (without qualification). Achievement is done by realizing the full human potential (rationality) in full and accompanied by the virtues (areté). The concept of Tenggerese happiness has a structural similarity to the concept of happiness in Aristotelian ethics. The Tenggerese, like Aristotle, see that happiness is not an instrumental purpose, but the ultimate goal of all human action. The Tengger people see a "tri-singular" relation in life, in a social, natural and spiritual context. On the basis of this relationship pattern then the main

life is to keep the harmony alive. This view of the principle of harmony then produces ethical virtues that are consistent with the principle (respect, harmony and simplicity). These virtues are the source of all good in life and, in the context of character education of the nation, these virtues can be a foothold and-especially-an example of what and how the character of this nation is built.

Keywords: Tengger Philosophy, Eudaimonia, Happiness, Character Buildin

PENDAHULUAN

Modernitas ternyata tidak melulu menghasilkan kemajuan dan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam konteks berbangsa. Dalam modernitas yang menjanjikan kemajuan dan kemudahan itu ternyata marak pula terjadi berbagai peristiwa yang meresahkan masyarakat. Maraknya terorisme, kasus korupsi yang selalu muncul dan tak kunjung tuntas, hingga berbagai tawuran di kalangan pelajar menyiratkan bahwa ada yang keliru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kekeliruan itu bisa berasal dari peran pemerintah yang tidak optimal dalam menjalankan fungsinya sehingga peran negara menjadi absen di tengah-tengah rakyat.

Absennya peran negara di dalam kehidupan rakyat ketika banyak di antara mereka masih terus mengalami kesulitan dalam soal kesejahteraan memicu timbulnya berbagai dampak negatif. Terkikisnya kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin dan tumbuhnya perasaan-perasaan putus asa akibat beban hidup yang terlampau berat adalah contoh dari dampak-dampak negatif yang timbul akibat absennya peran negara ini. Akhirnya, jalan pintas untuk menyelesaikan berbagai masalah pun banyak diambil orang: mereka yang putus harapan karena terdesak oleh sulitnya keadaan menanggalkan akal sehat dan mengambil jalan kekerasan; cara-cara koruptif untuk meningkatkan derajat hidup menjadi populer karena cara-cara yang benar seringkali berakhir sia-sia; generasi muda tumbuh di lingkungan yang keras dan tak terkontrol sehingga mereka menjadi bengis dan durhaka.

Menyalahkan pemerintah saja atas masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat ini memang adalah hal yang termudah untuk dilakukan, namun harus disadari bahwa sikap yang demikian itu tidaklah bijak. Sekalipun benar bahwa dalam situasi krisis yang bersifat multidimensional ini pemerintah memang melakukan berbagai kesalahan dan kekeliruan, tetapi multidimensionalitas krisis itu pun harus dinilai dari berbagai sebab yang juga multidimensional. Artinya, masalah yang terjadi bukan hanya berasal dari atas, yakni dari pemerintah, melainkan juga banyak disebabkan oleh kekacauan yang terjadi di bawah, di tengah-tengah masyarakat sendiri.

Nafsu untuk mementingkan diri sendiri sambil mengesampingkan yang

lain serta pola hidup yang tamak adalah penyakit gawat yang diderita tidak hanya oleh orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan saja, melainkan juga menjangkiti semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. Orang-orang kaya merasa kekayaannya tidak pernah cukup sehingga merasa perlu untuk terus memperkaya diri, sedangkan orang-orang yang berkuasa merasa kurang kuasanya dan takut tersaingi sehingga merasa perlu untuk menindas yang lain.

Sementara itu, wajah pendidikan dipenuhi oleh orang-orang dengan tiga karakter utama: pertama, mereka yang memandang prestise sebagai tujuan pendidikan—mereka ini cepat merasa cukup pintar dan berpotensi untuk memperparah keadaan karena mudah menyalahkan orang lain yang dianggap lebih rendah pendidikannya; kedua, mereka yang menganggap uang dan karir sebagai tujuan pendidikan—mereka ini tidak menganggap penting pengetahuan melainkan hanya uang dan jenjang karir yang dituju, sehingga hasil tertinggi dari pendidikan adalah selebar ijazah. Orang-orang yang memiliki salah satu dari kedua karakter ini (atau bahkan kedua-duanya sekaligus) sama-sama banyak dan mendominasi wajah pendidikan bangsa kita saat ini.

Orang-orang dengan tipikal ketiga dalam wajah pendidikan kita adalah yang jumlahnya paling sedikit. Mereka ini merupakan pengusung idealisme yang memandang tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang seutuhnya dalam rangka mencerdaskan dan memajukan kehidupan umat manusia. Jumlah mereka sangat sedikit sehingga suaranya tidak terdengar di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, atau walaupun terdengar maka mereka dikesampingkan karena jumlahnya yang sedikit dan pandangan-pandangannya yang kerap tidak sesuai dengan pendapat umum.

Situasi yang digambarkan di atas itu menyebabkan berbagai krisis terjadi dalam nyaris semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang-orang yang kaya tidak bisa diharapkan kedermawanannya; yang berkuasa tidak bisa diandalkan kebijakannya; dan yang berpendidikan tidak bisa dipercaya pandangannya. Dalam situasi seperti ini, akhirnya yang miskin, yang lemah dan yang bodoh, yang merasa menjadi korban dari situasi yang tidak menguntungkan ini, merasa boleh menyelesaikan masalahnya dengan aturan yang semena-mena. Dampaknya, disharmoni terjadi di mana-mana dan kebahagiaan semakin samar wujudnya.

Egoisme dan ketamakan merupakan buah yang dihasilkan dari kelirunya manusia dalam memandang hakikat diri dan tujuan hidupnya. Pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa karena potensi rasionalitasnya yang tak terbatas membuat manusia menjadi jumawa dan, pada abad Modern, kejumawaan itu menjadi-jadi dengan menguatnya paradigma dalam ranah sains yang menganggap bahwa manusia dapat mengetahui, memprediksi dan merekayasa realitas (alam) dengan ilmu pengetahuannya agar bermanfaat bagi kepentingan manusia. Paradigma ini membuat orang percaya bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dapat dijalani dengan mudah dan

menyenangkan.

Selama beberapa abad, kepercayaan itu agaknya terbukti benar: industrialisasi memudahkan orang untuk mendapatkan hal-hal yang berguna, bahkan sekalipun mereka tidak benar-benar membutuhkannya; pesatnya perkembangan di ranah teknologi informasi membuat jarak-jarak geografis semakin tak berarti dan manusia dengan mudah dapat menambah inventarisasi pengetahuannya secara lebih cepat dan jauh lebih banyak, meski entah untuk apa; dan gaya hidup yang menyenangkan segera menjadi orientasi bersama sebab segalanya telah menjadi lebih mudah, cepat dan murah. Manusia pun menjadi tergesa-gesa untuk meraih apa saja yang diinginkannya tanpa mengenal batas, sebab sains dan teknologi telah memungkinkan mereka untuk mendapatkan hampir apapun yang terlintas dalam pikiran. Inilah pangkal ketamakan massal masyarakat modern yang membuat mereka lupa bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja hadir untuk memenuhi kepentingan manusia, namun seharusnya juga dimanfaatkan bagi kepentingan alam dan lingkungannya (lihat: Hadi, 2003:7).

Gambaran tentang kehidupan masyarakat modern yang serba mudah, cepat dan menyenangkan membuat peradaban manusia sekilas tampak telah menginjak masa yang paling bahagia. Namun ternyata kebahagiaan itu hanya tampak di “permukaan” dan di pusat-pusat kota di mana orang-orang kaya tinggal, sebab faktanya di balik “kesuksesan” modernisasi itu alam telah menjadi rusak dan kemiskinan terus merajalela, sehingga lebih tepat jika modernitas disebut sebagai keadaan di mana manusia berhasil menciptakan jurang pemisah yang sangat dalam dan lebar di antara dirinya dan alam, juga di antara sesamanya sendiri. Pandangan terhadap nilai-nilai etis dianggap remeh karena tidak secara praktis mampu membawa perubahan dan tidak mampu mendorong masyarakat ke arah kemajuan (lihat: Wibisono, 2010:7).

Krisis yang dihadapi manusia ini pada akhirnya harus juga dinilai sebagai akibat dari krisis nilai yang melemahkan karakter manusia, baik dalam ranah individu maupun kolektif. Disebut melemahkan karakter, sebab krisis itu telah menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaannya yang mendasar. Disintegrasi kepribadian manusia modern yang tampil dalam sifat narsistik, pemujaan diri berlebihan, keterasingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah fenomena-fenomena yang hadir sebagai realitas kehidupan manusia kontemporer yang disebut oleh Malachi Martin sebagai “ketandusan kultural”—suatu situasi jiwa yang sekarat akibat gabungan antara ketiadaan tujuan (aimlessness) dan egoisme yang dominan (Nugroho, 2011:4).

Menurut Aristoteles, manusia—dan kemanusiaannya—dicirikan secara khas oleh kemampuan berpikir rasional demi kebaikan diri dan sesamanya serta lingkungannya. Tujuan dari sikap rasional ini harus disebutkan, sebab rasionalitas itu sendiri bukanlah tujuan, melainkan sarana bagi manusia untuk mengetahui kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, atau dalam istilah Aristoteles: “keutamaan-keutamaan”. Terlaksananya keutamaan-keutamaan inilah

yang pada akhirnya akan membawa manusia kepada kebahagiaan hakiki dalam hidupnya.

Orang Tengger, sebagaimana telah dijelaskan, memiliki suatu prinsip etika yang memandang perbuatan manusia harus diselaraskan dengan tiga ranah kehidupan yang melingkupinya, yakni ranah sosial, natural dan spiritual. Keselarasan itu adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan sebagai tujuan hidup tertinggi. Untuk mencapai keselarasan itu, manusia perlu menerapkan tiga prinsip dalam kehidupan, yakni saling menghormati, menjaga kerukunan dan bersikap sederhana. Ketiga prinsip ini bukan saja berlaku dalam ranah sosial, namun juga harus diterapkan dalam dua ranah kehidupan lainnya.

Pandangan hidup (filosofi) orang Tengger tentang kebahagiaan ini memiliki relevansi signifikan terhadap upaya pembangunan karakter bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki tata nilai budaya dan keyakinan yang kuat, yang mengejawantah dalam kebudayaan masyarakatnya dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga dapat ditanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat tersebut (Armando, dkk., 2008:8).

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan potensi alam, keragaman kultur dan budaya, dan berbagai potensi lainnya. Keragaman dan kekayaan itu di satu sisi bisa dipandang sebagai berkah yang menguntungkan kehidupan bangsa, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan masalah. Masalah-masalah yang potensial untuk terjadi misalnya perebutan dalam memanfaatkan sumberdaya alam, pecahnya konflik yang dilatarbelakangi perbedaan-perbedaan identitas (SARA) dan kepentingan golongan, dan sebagainya. Jika masalah-masalah itu tidak disikapi dengan bijak, kekayaan dan kebesaran bangsa ini justeru dapat berubah ancaman. Oleh karena itu, berbagai perbedaan dan keanekaragaman sumberdaya alam yang ada harus dikelola dengan mengedepankan sikap saling menghormati, rukun dan sederhana.

PRINSIP-PRINSIP FALSAFAH ORANG TENGGER DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

Sikap hormat penting artinya dalam mewujudkan iklim demokrasi yang sehat. Kebebasan berpendapat dan hak-hak asasi manusia memang dijamin dalam suatu sistem demokrasi, namun jangan dilupakan bahwa sikap hormat dalam menghadapi perbedaan—juga dalam menunjukkan perbedaan itu—perlu dijaga agar kebebasan dan hak-hak orang lain tidak tercederai oleh kehendak bebas seseorang yang ditunjukkan dengan cara yang tak pantas. Bagaimanapun, kebebasan berpendapat dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia itu awalnya juga lahir dari semangat untuk menghormati manusia dan kemanusiaannya, sehingga tidak pantas jika seseorang menunjukkan kurangnya rasa hormat saat mengemukakan pendapat dan menggunakan hak-haknya di hadapan orang lain.

Rasa hormat dalam berdemokrasi ini bisa diwujudkan dengan memperhatikan batas-batas apa saja yang perlu dijaga agar orang dapat saling memaha-

mi dan menghargai satu sama lain. Batas-batas itu misalnya antara lain berupa objektivitas dalam mengemukakan pendapat; menggunakan hak pribadi tanpa mengganggu hak orang lain dan lingkungan sekitar; memenuhi tuntutan-tuntutan atau kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara, dan lain-lain.

Khusus terkait dengan kebebasan berpendapat, masyarakat sering mengalami masalah dengan hal ini. Satu contoh, misalnya, media massa sebagai wujud dari ekspresi kebebasan berpendapat sering memuat berita yang “tidak layak konsumsi”. Ada kalanya berita-berita itu memuat unsur provokasi, kekerasan verbal yang merugikan golongan-golongan tertentu, bahkan pembunuhan karakter individu tertentu melalui berita-berita (gossips) yang tak memiliki dasar faktual yang kuat. Hal semacam ini merupakan preseden buruk bagi demokrasi, sebab demokrasi tidak dapat dijalankan berdasarkan gosip.

Objektivitas dalam berpendapat penting artinya, sebab objektivitas mampu memberikan batasan yang jelas dalam hal-hal apa orang dapat berbeda pendapat dan dalam hal-hal apa orang perlu sepakat. Objektivitas didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan dapat diterima secara lebih luas dibandingkan jika orang menyampaikan pendapat-pendapat subjektifnya. Demokrasi yang dijalankan dengan subjektivitas akan menjadi demokrasi yang kacau, sebab dalam subjektivitas itu tiap orang bisa membenarkan pendapatnya sendiri secara emosional. Kebencian atau kesenangan subjektif dapat membuat orang menolak atau sepakat terhadap berbagai hal dengan alasan yang tidak rasional. Saat seseorang menunjukkan hal-hal yang tidak rasional, maka orang lain akan lebih mudah kehilangan rasa hormat kepadanya dan ini adalah sumber dari tumbuhnya penolakan dan permusuhan. Oleh karenanya, antara demokrasi dan prinsip hormat menjadi erat kaitannya, bahkan prinsip hormat ini bisa disebut sebagai syarat bagi terbentuknya demokrasi yang sehat.

PRINSIP RUKUN DALAM KONTEKS INTEGRASI BANGSA

Selain prinsip hormat, prinsip kerukunan juga penting artinya dalam membangun iklim demokrasi yang sehat. Prinsip kerukunan menuntut bahwa kedamaian dan keselarasan dalam kehidupan perlu dijaga dan dipertahankan. Dalam konteks demokrasi di mana setiap orang sangat mungkin berhadapan dengan berbagai perbedaan pendapat setiap saat, menjaga perdamaian dan mempertahankannya memerlukan sikap batin yang kuat. Pertama, orang harus bisa mengendalikan emosinya saat berhadapan dengan pendapat-pendapat yang mungkin tidak dapat ia sepakati. Di saat bersamaan, ia juga harus bisa mengendalikan diri agar tidak bersikap emosional saat menyampaikan pendapatnya, sebab pendapatnya juga sangat mungkin untuk tidak disepakati oleh orang lain.

Dalam berdemokrasi dan berhadapan dengan berbagai perbedaan pendapat, orang perlu memegang prinsip bahwa pendapatnya benar tapi mungkin salah, dan pendapat orang lain salah tapi mungkin benar, atau sebaliknya. Dengan demikian, kemungkinan-kemungkinan bagi terjadinya hubungan dialo-

gis akan tetap terbuka. Bagaimanapun, dialog adalah salah satu hal yang sangat penting dalam demokrasi, sementara memaksakan pendapat kepada orang lain adalah sikap yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan merendahkan hak asasi manusia.

Terwujudnya kerukunan yang dilandasi kesediaan setiap pihak untuk sama-sama mengendalikan emosi dalam konteks berdemokrasi adalah tanda dari cerdasnya kehidupan bangsa, sebab demokrasi yang sehat tidak akan terwujud tanpa dilatari oleh pikiran-pikiran yang sehat pula. Dengan pikiran yang sehat ini sikap-sikap emosional dapat terkendali dan pecahnya konflik dapat dihindari. Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan pembangunan nasional yang memuat empat pokok tujuan, yakni: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) menciptakan kesejahteraan umum, (3) melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan (4) berperanserta dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi (lihat: Bappenas, 2009:2).

Terwujudnya masyarakat yang dapat berdemokrasi secara sehat dengan tetap memelihara kerukunan antar setiap elemen yang ada di dalamnya, baik antar individu dengan individu lain maupun antar satu kelompok dengan kelompok lain, akan sangat berguna bagi terjaminnya integrasi bangsa. Hal inilah yang dikehendaki oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika—suatu semboyan yang menggambarkan hidupnya pluralitas dalam kesatuan dan persatuan bangsa.

PRINSIP SEDERHANA DALAM KONTEKS KEDAULATAN EKONOMI

Kesederhanaan juga memegang peran penting dalam upaya pembangunan karakter bangsa, khususnya di bidang kedaulatan ekonomi. Di dalam negara hukum dan demokratis seperti Indonesia ini, hak-hak asasi manusia dijamin kebebasannya oleh undang-undang dan dilindungi oleh hukum. Hanya saja, iklim kebebasan itu seringkali disalahgunakan orang untuk berbuat sekehendak hati tanpa memperhatikan batas-batas yang mengesahkan haknya.

Gaya hidup mewah dan selalu memperturutkan hawa nafsu adalah benih dari perbuatan-perbuatan korup. Perbuatan yang demikian ini tentu merugikan, bukan hanya bagi orang yang menjadi korban, melainkan juga bagi pelakunya. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di negara ini, di mana pelakunya mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas, jelas merupakan akibat langsung dari sifat tamak manusia yang tumbuh subur dalam gaya hidup mewah itu. Mengapa dikatakan demikian? Tak lain sebab koruptor-koruptor itu sesungguhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara cukup dan layak, namun pada kenyataannya mereka selalu merasa tak puas sehingga tertarik untuk memiliki lebih banyak lagi.

Perasaan tak puas memang secara alamiah terdapat dalam diri manusia, karena itu merasa tak puas adalah wajar. Akan tetapi, mengikuti Aristoteles, perasaan tak puas dan ketamakan akan hal-hal yang sifatnya jasmaniah memang dimiliki manusia, tapi perasaan itu bukan merupakan bagian dari karakter kemanusiaannya, melainkan lebih sebagai tanda dari sifat-sifat kebinatan-

gannya (Aristotle, 2004:56/N.E., III:10).

Sains dan teknologi modern telah menyediakan bukan hanya kemudahan bagi manusia, namun juga berbagai kemewahan yang semakin terjangkau. Saat dunia semakin terbuka dengan adanya teknologi informasi yang canggih, orang semakin bebas dan mudah untuk menjadi konsumen dari apapun yang tersedia—bukan dari apapun yang dibutuhkan. Era globalisasi dan digelarnya liberalisme pasar mengundang hasrat manusia untuk semakin bersikap narsis: orang ramai membeli aneka barang yang nilainya tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkannya dan semua itu dilakukan demi memenuhi hasrat akan gengsi.

Kebiasaan bergaya hidup mewah tidak hanya buruk bagi pembentukan karakter manusia. Kebiasaan ini juga merugikan secara ekonomis, sebab dalam gaya hidup mewah manusia dituntut untuk selalu melampaui batas-batas kebutuhan dasarnya. Jika orang butuh makan untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat, orang yang bergaya hidup mewah perlu memilih makanan yang enak, mahal dan bergengsi, meskipun untuk kadar nutrisi yang setara atau lebih dari kandungan dalam makanan yang bergengsi itu bisa diperoleh orang lain dengan harga yang jauh lebih murah.

Kesederhanaan adalah sifat yang akan menjadikan seseorang berdaulat atas dirinya sendiri. Ia tidak akan terombang-ambing dalam arus massa yang dalam era sekarang begitu bebas bergerak dalam banalitas informasi yang propagandis dan tendensius. Iklan-iklan produk komersial saling berebut menciptakan opini publik tentang apa yang seharusnya mereka miliki—bukan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Barang-barang menyerbu pasar yang penuh dengan orang-orang “sadar gengsi”. Dalam situasi seperti ini terjadilah “dominasi simbolik”—demikian istilah Bourdieu (1999:480)—yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya produksi atau reproduksi ketidaksetaraan dalam struktur masyarakat. Tanpa disadari, kondisi inilah biang terjadinya krisis ekonomi yang dapat menjalar kepada krisis-krisis di bidang lainnya. Hanya sikap sederhanalah yang dapat menjadi perisai dari kemungkinan buruk anjoknya perekonomian seperti itu. Maka sikap sederhana, yang diberlakukan dalam ranah individu maupun sosial, adalah prasyarat bagi tercapainya kedaulatan ekonomi.

Secara sosial, kebiasaan bergaya hidup mewah juga sangat potensial untuk merusak tatanan masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sikap mengedepankan gaya hidup mewah bisa mengundang terjadinya konflik akibat kecemburuan sosial. Dengan sikap “yang semadyanya”, atau sederhana, orang dapat menutup peluang bagi terjadinya kecemburuan sosial itu dan dengan demikian, secara tidak langsung berarti ia telah menjaga keselarasan dalam lingkungannya.

REFERENCES

- Aristotle, 2004, *Nicomachean Ethics* (translated by Roger Crisp), United Kingdom: Cambridge University Press.
- Armando, Ade, dkk., 2008, *Refleksi Karakter Bangsa*, Jakarta: Forum Kajian Antropologi Indonesia
- Bappenas, 2009, *Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*, makalah diakses dari situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di www.bappenas.go.id
- Bourdieu, Pierre, 1999, *Language Symbolic and Power*, dalam Jaworsky, Adam and Nikolas Coupland (ed.), *The Discourse Reader*, USA: Routledge
- Hadi, Hardono, 2003, *Pengantar*, dalam Aholiab Watloly, *Tanggungjawab Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius
- Hefner, Robert W., 1999, *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (diterjemahkan oleh A. Wisnuhardana dan Imam Ahmad), Yogyakarta: LKiS.
- Machmud, Muslimin, 2003, *Mitos dan Adat Istiadat Masyarakat Tengger*, dalam Nurudin, dkk. (ed.), *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta: LKiS dan UMM Press.
- Nugroho, Ellen Christiani, 2011, *Menghargai Modus-modus Esensial Manusia sebagai Upaya Mengatasi Problem Dehumanisasi di Indonesia*, artikel dalam *Jurnal "Humanika"* (Vol.14), Semarang: FIB Undip
- Wibisono, Koento, 2010, *Filsafat Ilmu* (Diktat kuliah), Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM.